



## KMS Bebas Pungutan Sekolah

**YOGYAKARTA** – Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta memastikan calon siswa pemegang Kartu Menuju Sehat (KMS) tidak akan dipungut biaya untuk daftar ulang setelah dinyatakan diterima.

Bantuan biaya pendidikan yang disalurkan dari Unit Pelaksana Teknis Jaminan Pendidikan Daerah (UPT JPD) seharusnya dapat dimanfaatkan untuk menutup biaya operasional siswa selama belajar di sekolah. Termasuk biaya untuk kebutuhan pribadi siswa seperti buku dan seragam. Kebijakan tersebut bertujuan untuk memperluas akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat.

“Sampai batas tertentu untuk buku dan seragam mungkin bisa. Untuk sekolah negeri harus bebas pungutan,” kata Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta Budi Santosa Asrori kemarin.

Sementara untuk sekolah swasta, Dinas Pendidikan memberikan imbauan agar sekolah membebaskan siswa pemegang KMS dari pungutan. Swasta dapat menggunakan sistem subsidi silang untuk membebaskan pemegang KMS dari pungutan.

Budi menambahkan, sesuai dengan kebijakan Pemkot Yogyakarta, pemegang KMS yang tidak diterima di sekolah negeri tetap mendapatkan jaminan dari UPT JPD. “Semua yang sudah terdaftar pada proses pendaftaran KMS kemarin sudah masuk dalam daftar penjaminan di UPT,” tandasnya.

Proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) khusus pemegang KMS di Kota Yogyakarta kemarin telah diumumkan hasilnya. Dari pantauan SINDO, jenjang SMP dari 851 kursinya terisi 96% atau 817. Adapun di jenjang SMA dari 129 kursi yang terisi 62% (79) dan SMK dari 894 kursi yang terisi hanya 87% (770).

Salah satu orang tua siswa peserta PPDB KMS 2011, Surtanti mengungkapkan, anaknya yang diterima di SMP Negeri 1 Yogyakarta tidak dipungut biaya untuk mengikuti daftar ulang. Setelah dinyatakan diterima kemarin, dia hanya diminta mengisi formulir pernyataan sebagai bagian dari proses daftar ulang.

Siswa miskin di Kota Semarang yang meneruskan belajar di sekolah berstatus Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) juga dibebaskan dari biaya pendidikan. Baik itu biaya pendidikan untuk SPP maupun Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI).

“Hanya, untuk yang sifatnya personal seperti sepatu, seragam, buku, dan semacamnya menjadi biaya sendiri. Kami juga akan mengupayakan adanya orang tua asuh bagi para siswa yang kurang mampu ini,” kata kepala SMA Negeri 1 Semarang Bambang Nianto Mulyo.

Sekolah di Magelang juga dilarang melakukan pungutan biaya pendaftaran penerimaan siswa baru (PSB) dan daftar ulang maupun uang gedung. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Magelang Ngaderi Budiono mengatakan pungutan biaya pendaftaran PSB maupun daftar ulang dan uang gedung menyalahi aturan program bantuan operasional sekolah (BOS), yang ditetapkan pemerintah pusat.

“Penggunaan dana program BOS untuk menggratiskan seluruh siswa SD dan SMP negeri dari biaya operasional sekolah, dan meringankan beban biaya operasional sekolah bagi siswa sekolah swasta,” tandasnya.

● susilo himawan/  
maha deva/m abduh

JUMLAH PESERTA DIDIK PEMEGANG KMS DI KOTA YOGYAKARTA (Termasuk Siswa Baru 2011)	
Jenjang Pendidikan	Jumlah Siswa
TK	1.601 siswa
SD	6.338 siswa
SMP	3.232 siswa
SMA	608 siswa
SMK	2.446 siswa

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pendidikan	Positif	Biasa	Untuk Diketahui
2. UPT. JPD			

Yogyakarta, 30 November 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005